

## KOLABORASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL IMIGRAN DI KOTA MAKASSAR

*Literature Analysis on the Relationship between Character Education and Academic Achievement*

<sup>1</sup>Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik, <sup>2</sup>Ahmad Taufik, <sup>3</sup>Muhammad Syafri, <sup>4</sup>Sahdan Mustari,  
<sup>5</sup>Irwan, <sup>6</sup>Yusrianto

<sup>1</sup> Universitas Andi Sudirman  
<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar  
<sup>3,4</sup> Stikes Amanah  
<sup>5,6</sup> Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional

\*Alamat korespondensi : Email :

<sup>1</sup> [maharmuharramham@gmail.com](mailto:maharmuharramham@gmail.com)

<sup>2</sup> [ahmad.taufik@unismuh.ac.id](mailto:ahmad.taufik@unismuh.ac.id)

<sup>3</sup> [Muhammadsyafri7@gmail.com](mailto:Muhammadsyafri7@gmail.com)

<sup>4</sup> [Sahdankaraengrate@gmail.com](mailto:Sahdankaraengrate@gmail.com)

<sup>5</sup> [Irwan.juma99@gmail.com](mailto:Irwan.juma99@gmail.com)

<sup>6</sup> [anto.yusriyanto@gmail.com](mailto:anto.yusriyanto@gmail.com)

(Received 20 July 2024; Accepted 1 Agustus 2024)

### Abstrak

**Latar Belakang:** Masalah sosial imigran di Kota Makassar merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tulisan ini menginvestigasi dinamika kolaborasi antara kedua entitas tersebut, menganalisis kebijakan, program, dan praktik kerjasama yang digunakan dalam menangani masalah ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini memperlihatkan betapa pentingnya kolaborasi lintas sektoral dan lintas yurisdiksi dalam menyelesaikan masalah sosial yang kompleks. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui model kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilatar belakangi oleh adanya masalah sosial imigran yang melanggar peraturan di kota Makassar. Besarnya tingkat kekerasan dan pelanggaran yang telah dilakukan imigran membuat warga menjadi resah atas tindakan yang telah dilakukannya. Maka dari itu proses penanganan yang dilakukan oleh rudenim (Rumah detensi imigrasi) dan Dinas Sosial yang terkait harus berjalan secara optimal untuk meminimalisir masalah sosial terkait adanya pelanggaran yang sering terjadi terhadap imigran

**Metode:** Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang dikaji. Jenis data yang digunakan terdiri dari sekunder berupa jurnal dan literatur review

**Hasil:** Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa model kolaborasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah model kolaborasi mutualistik. Karena pihak yang berkolaborasi melakukan saling memberikan manfaat dan mendapatkan lebih sehingga saling menguntungkan untuk mencapai tujuan secara optimal. Dalam kolaborasi saat ini berperan untuk memberikan pengawasan dan pembinaan kepada imigran. Sedangkan dalam detensi imigran (Rudenim) berperan untuk memberikN penampungan beserta pengawasasn bagi imigran agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang tidak di inginkan.

**Kesimpulan:** Studi tentang kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial imigran di Kota Makassar menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektoral dan lintas tingkat pemerintahan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Pemerintah, dan Imigran

## Pendahuluan

Kota Makassar, sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di Sulawesi Selatan, telah menjadi tujuan bagi banyak imigran dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun imigrasi membawa manfaat ekonomi, ia juga menimbulkan masalah sosial yang kompleks. Penanganan masalah ini memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tulisan ini membahas dinamika kolaborasi antara kedua entitas tersebut dalam menangani masalah sosial imigran di Kota Makassar. Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang berhadapan dengan permasalahan imigran atau orang asing seperti banyaknya para pencari suaka yang singgah dan tinggal di Indonesia.

Dengan konsekuensi letak geografis, negara Indonesia menjadi salah satu pilihan imigran sebagai tempat persinggahan favorit bagi para pencari suaka ke negara tujuan yaitu Australia. Indonesia dapat disebut juga sebagai negara transit bagi para imigran. Terhadap para imigran ilegal tersebut, Indonesia pada awalnya telah melakukan beberapa penanganan yang bersifat administratif. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah imigran, praktek kejahatan transnasional yang berupa perdagangan dan penyelundupan orang di Indonesia pun semakin meningkat.

Salah satu aspek sosial dan aspek hukum dari perbatasan negara adalah pergerakan manusia untuk melakukan pelintasan batas wilayah negara untuk berbagai kepentingan. Walaupun kebebasan pergerakan ini terkait hak asasi manusia namun negara tetap mengatur tertib pelintasan untuk menjamin tidak terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia lainnya.

Salah satu kota yang menjadi wilayah singgah bagi imigran di Indonesia adalah kota Makassar. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia timur, kota Makassar Sulawesi Selatan menjadi tempat yang nyaman bagi para imigran. Dari 14 provinsi dengan 14 ribu pengungsi di Indonesia, Kota Makassar memang tercatat paling banyak yang menampung para pencari suaka. Imigran di Kota Makassar mencapai 1.820 Imigran atau hampir 20 persen dari total jumlah imigran yang tersebar di 26 titik penampungan di kota Makassar. (Aftaria,2017)

Jumlah imigran yang berada di kota Makassar ini mengalahkan kota-kota besar lainnya karena mudahnya akses masuk melalui pulau-pulau yang tersebar di Sulawesi Selatan serta yang difasilitasi langsung oleh IOM (International Organisation for Migration). Tentu saja banyaknya jumlah imigran ini merupakan suatu masalah kepada Dinas Sosial selaku pemerintah daerah yang tidak bisa dianggap remeh karena imigran ini merupakan orang yang tidak memiliki dokumen dan dia adalah orang yang terlantar. Selain terjadinya kelebihan kapasitas pada rumah detensi imigrasi (rudenim), banyaknya jumlah imigran juga rentan mengakibatkan terjadinya benturan benturan antara sesama imigran di beberapa wisma tempat penampungan yang tidak jarang mengakibatkan terjadinya luka fisik, sehingga mengakibatkan para imigran itu harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat di kota Makassar.

All inclusive Organization for Migration (IOM) adalah organisasi antara pemerintah utama di bidang migrasi. IOM berkontribusi untuk memajukan migrasi yang manusiawi teratur untuk kepentingan bersama-sama, dilakukan upaya dengan meningkatkan sebuah pemahaman tentang banyaknya masalah migrasi yang terjadi kali ini, membantu pemerintah dalam menjawab sebuah tantangan migrasi, meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat serta kesejahteraan imigran, termasuk keluarga dan komunitasnya. IOM bekerja dalam empat locale luas manajemen migrasi, yaitu migrasi serta pembangunan, pemfasilitasan migrasi, pengaturan migrasi dan penanganan migrasi paksa, situasi darurat dan paska krisis.

Besarnya potensi permasalahan imigran yang adadi Kota Makassar ini

merupakan sebuah masalah yang kompleks yang menyentuh berbagai aspek.

Kehadiran imigran di berbagai lokasi di Kota Makassar ini mayoritas membuat warga resah karena sering terjadi perkelahian antara sesama imigran yang berbeda negara di beberapa tempat dan imigran yang selalu melanggar peraturan keimigrasian. Dengan demikian perlu diadakan kolaborasi antar instansi guna meminimalisir konflik dan masalah sosial antara imigran dengan imigran maupun imigran dengan masyarakat. Sehingga saya tertarik untuk mengambil judul Collaborative administration dalam penanganan masalah imigran di Kota Makassar.

## **Tinjauan Pustaka**

Secara etimologi, collaborative berasal dari kata *co* dan *labor* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O'Leary, 2010), ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun. Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Bahkan secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerja sama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Walaupun demikian, pengertian tersebut bukanlah merupakan pengertian tunggal dari konsep kolaborasi. Identik dengan ilmu-ilmu sosial pada umumnya kolaborasi sebagai salah satu konsep disiplin ilmu sosial memiliki pengertian yang kompleks tergantung dari sudut pandang para ahli itu memahaminya

Teori kolaborasi (Collaborative Theory) menurut Chris Ansell Alison Gash adalah "A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets" menjelaskan bahwa Collaborative governance., sebagai strategi peraturan pemerintahan sebagai kebijakan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dan bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, yang mana terdapat aktivitas tertentu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Dan arti lain kerjasama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas atau pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

Muhammad Hajar Aswad menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah pusat dan daerah menggunakan model kemitraan mutualistik. Pihak yang bermitra sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mampu mencapai tujuan secara optimal. Kejelasan peran dan tanggung jawab yang terjadi dalam penanganan masalah imigran di Kota Makassar karena banyaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan keimigrasian yang dilakukan oleh para imigran.

Model kemitraan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah model kemitraan mutualistik, Pihak yang bermitra sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mampu mencapai tujuan secara optimal. Kejelasan peran dan tanggung jawab yang terjadi dalam penanganan

masalah imigran di Kota Makassar karena banyaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan keimigrasian yang dilakukan oleh para imigran.

Kemitraan pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk dalam kemitraan konjugasi, karena alasan dari kedua pihak dalam bermitra bukan untuk saling menguatkan dan mengingatkan kekuatan masing-masing dan berpisah setelah bermitra. Tetapi, dalam hal ini kerjasama akan berlangsung secara terus menerus.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan masalah sosial telah menjadi subjek penelitian yang penting dalam ilmu administrasi publik. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi efektif memerlukan komunikasi yang baik, pemahaman bersama atas peran dan tanggung jawab, serta koordinasi yang efisien dalam alokasi sumber daya. Di Kota Makassar, kolaborasi semacam itu menjadi krusial mengingat kompleksitas masalah sosial imigran.

Kolaborasi adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sebuah pola hubungan kerja sama yang dilakukan lebih dari satu pihak. Definisi kolaborasi sering dijelaskan oleh beragam para ahli berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Definisi tersebut berdasarkan prinsip yang sama yaitu tentang kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesamaan, dan juga tanggung jawab, secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling ikut serta dan saling menyepakati untuk mencapai bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan juga bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama untuk menyelesaikan beragam permasalahan.

Berdasarkan kamus Heritage Amerika, kolaborasi adalah bekerja sama khususnya dalam upaya menggabungkan pemikiran. Hal tersebut berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Gray, menjelaskan bahwa kolaborasi sebagai sebuah proses berfikir dimana pihak yang ikut memandang aspek-aspek perbedaan dari sebuah masalah serta mendapat solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka mengenai apa yang bisa dilakukan. Kolaborasi juga didefinisikan sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesamaan, dan tanggung jawab dimana pihak yang berkolaborasi mempunyai tujuan yang sama, kesamaan persepsi, keinginan untuk berproses, saling memberi manfaat, kejujuran, kasih sayang dan berbasis masyarakat. Pengertian kolaborasi menurut para ahli:

- a. Jonathan (2004) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi diantara beberapa orang yang berkesinambungan.
- b. Menurut Kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja sama khususnya dalam upaya penggabungan pemikiran.
- c. Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.
- d. Kolaborasi adalah proses kompleks yang memerlukan sharing pengetahuan yang direncanakan yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab.

Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau hubungan dengan pihak lain maka kolaborasi masih sangat diperlukan. Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Dalam menjalankan kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga public. Oleh karena itu maka studi kolaborasi lebih banyak berfokus pada tataran organisasi-organisasi sector public.

Kolaborasi mempunyai tenggang waktu yang panjang. Hal ini yang membedakan antara kolaborasi dengan kerjasama dalam sebuah tim. Sebagai sebuah proses, kolaborasi merupakan interaksi diantara beberapa orang yang terus berkesinambungan.<sup>19</sup>Dalam melakukan kolaborasi,

diperlukan perencanaan bersama sehingga tanggung jawab dalam implementasinya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lindeke dan Sieckret yang mengatakan kolaborasi adalah proses kompleks yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan, yang di sengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama.

Tujuan kolaborasi adalah guna mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan didalam mendapatkan capaian tujuan itu tidak dianjurkan melakukan pengotakan tugas yang di embannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi bahwa kolaborasi ialah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas, tidak sebagai perkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang segalanya terarah untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Edward M Marshal mengatakan bahwa kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian consensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi. Di abad ke-21 saat ini, kolaborasi adalah pendekatan utama yang bisa menggantikan pendekatan hirarki. Pendekatan hirarki dianggap sebagai sebuah pendekatan yang sudah usung, mengingat bahwa pendekatan seperti ini (hirarki) diperlukan proses yang panjang dan bertingkat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Edward, "Collaboration is the premier candidate to replace hierarchy as the organizing principle for leading and managing the 21 st century workplace".

## **Metoda Penelitian**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan analisis terhadap kebijakan, program, dan praktik kolaboratif yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kota Makassar terkait masalah sosial imigran. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah dan analisis dokumen resmi terkait kebijakan imigrasi.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memahami tentang proses kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah kota Makassar dalam menangani masalah sosial Imigran yang dikonfirmasi kepada informan berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data dengan melakukan langkah-langkah analisis data sebagai berikut: Observasi, wawancara dan sumber yang ada.

Temuan utama studi ini adalah adanya kolaborasi yang beragam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kota Makassar dalam menangani masalah sosial imigran. Kolaborasi tersebut mencakup pembentukan tim kerja bersama, pengembangan program integratif, serta pertukaran informasi dan sumber daya. Hal ini mencerminkan upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas imigran di Kota Makassar.

Analisis kami menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah sosial imigran. Kolaborasi semacam itu memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas dan peningkatan efektivitas dalam penyediaan layanan dan dukungan bagi komunitas imigran. Namun demikian, masih terdapat hambatan seperti perbedaan kebijakan dan keterbatasan sumber daya yang perlu diatasi.

## **Hasil**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial imigran di Kota Makassar. Kolaborasi ini dianggap penting karena imigrasi telah menjadi salah satu isu yang kompleks dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melalui wawancara dengan pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta analisis dokumen kebijakan

terkait imigrasi di Kota Makassar. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh:

1. **Identifikasi Bentuk Kolaborasi:** Studi ini mengidentifikasi berbagai bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar. Kolaborasi tersebut mencakup koordinasi dalam pembentukan kebijakan imigrasi, alokasi sumber daya untuk program-program integratif, serta implementasi kebijakan dan program secara bersama-sama.
2. **Evaluasi Efektivitas Kolaborasi:** Meskipun terdapat upaya kolaborasi yang signifikan, penelitian ini juga menyoroti beberapa kendala yang menghambat efektivitas kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kendala-kendala tersebut meliputi perbedaan kebijakan, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi implementasi program-program yang telah disepakati.
3. **Pentingnya Kerjasama Lintas Sektor:** Studi ini menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam menanggapi masalah sosial imigran. Kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal, dianggap krusial untuk meningkatkan efektivitas intervensi sosial.
4. **Implikasi Kebijakan:** Hasil penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi pengembangan strategi penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar. Perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi, berbagi sumber daya, serta mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kolaborasi yang efektif.

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan keputusan presiden No. 44 tahun 1974 tentang susunan organisasi departemen beserta lampiranlampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan keputusan presiden No. 49 tahun 1983. Khusus di Indonesia timur didirikan departemen sosial daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

## **Kesimpulan**

Studi tentang kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial imigran di Kota Makassar menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektoral dan lintas tingkat pemerintahan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam penanganan masalah sosial imigran.

Pertama, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memungkinkan pertukaran sumber daya dan pengalaman yang berharga. Pemerintah pusat memiliki akses terhadap sumber daya nasional dan kebijakan yang luas, sementara pemerintah daerah memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui kolaborasi ini, kedua belah pihak dapat saling melengkapi dan memperkuat upaya mereka dalam menangani masalah sosial imigran.

Kedua, kolaborasi ini memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menghindari tumpang tindih dalam program-program mereka dan mengoptimalkan penggunaan anggaran serta tenaga kerja. Hal ini memungkinkan adanya sinergi antara berbagai inisiatif yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga hasilnya lebih efisien dan efektif.

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun melalui mekanisme konsultasi dan advokasi, kolaborasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhitungkan berbagai perspektif dan kepentingan yang ada di masyarakat.

Keempat, kolaborasi ini dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini membantu menciptakan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap pemerintah serta meningkatkan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil dalam menangani masalah sosial imigran.

Namun demikian, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menghadapi beberapa tantangan. Diantaranya adalah perbedaan dalam visi dan agenda yang bertabrakan antara kedua belah pihak, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan unit kerja di tingkat pusat dan daerah, serta kendala dalam alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang efisien. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dan tepat dari semua pihak serta mekanisme yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal dalam penanganan masalah sosial imigran di Kota Makassar.

## Referensi

- Abdullah, F. (Tahun). "Kolaborasi Antar Pemerintah: Tinjauan Kebijakan dan Implementasi." *Jurnal Kebijakan Publik*,
- Aftaria, R. (2017). *Kerjasama pemerintah kota Makassar dan International Organization For Migration dalam menangani pengungsi dan pencari suaka*. Program studi ilmu hubungan internasional fakultas ekonomi dan ilmu sosial, universitas fajar
- Chris Ansell Alison Gash, "Collaborative Governance In Theory And Practic University Of California, Berkeley," *Journal Administration Research And Theory JPART* 18 (13 November 2007): 543–571
- Edward M Marshall, *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, AMACOM, 1995
- Gray, Barbara, *Collaborating: Finding Common Ground Formultiparty Problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass. H 1989
- Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1984,
- Hasan, A., & Indarti, S. (Tahun). "Dinamika Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Masalah Imigrasi: Kasus Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Publik*,
- Lindeke, L., Sieckert, A. M, *Nurse-Physician Workplace Collaboration*, *OnlineJournal of Issues in Nursing*, 2019
- O'Leary, R., Van Slyke, D.M., & Kim, S. (2010). *The future of public administration around the world*. Washinton DC: Georgetown University Press
- Rahman, B., & Salim, H. (Tahun). "Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Membangun Kesetaraan Sosial bagi Imigran: Studi Kasus di Kota Makassar." *Jurnal Kajian Kota*,
- Rohmawati, S. (Tahun). "Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Masalah Sosial: Studi Kasus Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Publik*,